



- 04** **Wacana Kebugaran Pada Unggahan Individu di Instagram**
Magda Sabrina Theofany Simanjuntak
- 19** **Reception Analysis on Adolescent Consumptive Behaviour in BTS 'Spine Breaker' Lyrics Among Indonesian Army**
Annisa Mutiara Paundra, Rina Sari Kusuma
- 37** **Adaptive Governance Komunikasi Informasi Bencana Covid-19 Melalui Facebook dan Twitter oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
Fajar Rahmanto, Muchamad Zaenuri, Al Fauzi Rahmat
- 59** **Konstruksi Realitas Pengukuran Tanah di Wadas dalam Media Online Nasional: Analisis Framing Pemberitaan Isu Wadas di Tempo.co Periode 8-11 Februari 2022**
Bonifatius Wisnumurti Bayuaji, Zainuddin Muda Z. Monggilo
- 81** **Kecakapan Digital: Pemanfaatan Shopee Dalam Peningkatan Penjualan UMKM Shiroshima Indonesia Pasca Covid-19**
Meli Firdausi Nazila



Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia,
Volume 5, Nomor 1, Maret 2024 (halaman 4 – halaman 96)

Daftar ISI

Wacana Kebugaran Pada Unggahan Individu di Instagram Magda Sabrina Theofany Simanjuntak	4
Reception Analysis on Adolescent Consumptive Behaviour in BTS 'Spine Breaker' Lyrics Among Indonesian Army Annisa Mutiara Paundra, Rina Sari Kusuma	19
Adaptive Governance Komunikasi Informasi Bencana Covid-19 Melalui Facebook dan Twitter oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Fajar Rahmanto, Muchamad Zaenuri, Al Fauzi Rahmat	37
Konstruksi Realitas Pengukuran Tanah di Wadas dalam Media Online Nasional: Analisis Framing Pemberitaan Isu Wadas di Tempo.co Periode 8-11 Februari 2022 Bonifatius Wisnumurti Bayuaji, Zainuddin Muda Z. Monggilo	59
Kecakapan Digital: Pemanfaatan Shopee Dalam Peningkatan Penjualan UMKM Shiroshima Indonesia Pasca Covid-19 Meli Firdausi Nazila	81

Adaptive Governance Komunikasi Informasi Bencana Covid-19 Melalui Facebook dan Twitter oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Fajar Rahmanto	Master of Government Affairs and Administration, UMY Email: fajarrahmanto1@gmail.com
Muchamad Zaenuri	Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY Email: muchamadzaenuri@umy.ac.id
Al Fauzi Rahmat	Master of Government Affairs and Administration, UMY Email: fauzirahmata@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the extent to which local governments have adapted to using social media to handle the Covid-19 disaster. This study uses a qualitative approach. Primary data collection by interview and secondary from social media accounts of local government organizations of the Special Province of Yogyakarta were analyzed with NVivo12 Plus. The result of the study shows the use of social media Facebook and Twitter by government agencies in the Special Region of Yogyakarta Province in handling COVID-19 to convey health information to the public. The ability of the DIY Provincial Government to adapt by utilizing social media to disseminate disaster information is supported by an increase in regional government internet capacity by 83.5%, as well as an increase in internet access for communities in rural areas by 38.05% and urban communities by 8.38%. The local government uses the social media platforms Facebook and Twitter as well as the CMS (Corona Monitoring System) to increase public access to information on the COVID-19 disaster. In the end, this research concludes that the use of social media by local governments to communicate pandemic disaster information can encourage adaptive governments to carry out disaster management so that they are better prepared to face disasters that occur quickly.

Keywords: Adaptive Governance, Disaster Information Communication, social media, Covid-19

Pendahuluan

Bencana non-alam Covid-19 telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian situasi. Perubahan lingkungan dan situasi yang sangat cepat akibat Covid-19, diperlukan tata kelola pemerintahan yang adaptif untuk meresponnya (Zaenuri, 2014). Tata kelola adaptif akan sangat efektif apabila didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Tata kelola adaptif dengan pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan menghadapi bencana. Kecepatan suatu komunitas melakukan mobilisasi informasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi media sosial tergantung dengan tingkat adaptasi terhadap perubahan yang terjadi (Yuliana, 2019).

Covid-19 sebagai bencana pandemi masih banyak hal yang belum dipahami oleh banyak pihak akibat

minimnya referensi pengetahuan tentang virus ini. Tidak hanya pengetahuan dari aspek medis seperti pencegahan penyebaran, metode pengobatan, serta pengembangan vaksin dan lain-lain tetapi banyak aspek non-medis yang perlu dipelajari, salah satunya dalam bidang komunikasi dan informasi. Penanganan komunikasi dan informasi bencana yang tanggap, cepat, tepat, dan transparan menjadi harapan seluruh masyarakat di masa krisis akibat Covid-19.

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Covid-19 melalui dukungan sektor pos dan informatika turut berkontribusi dan memberikan langkah-langkah untuk membantu masyarakat. Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dilakukan melalui sosialisasi dan iklan layanan masyarakat. Untuk mendorong penyebaran informasi dan komunikasi dalam upaya ini dilakukan dengan media sosial resmi dari masing-masing Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota terkait. Pemaparan informasi risiko bencana meliputi intensitas penggunaan media, frekuensi penggunaan media, dan kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana (Islami et al., 2022).

Pada akhir Maret 2020, di Provinsi DIY muncul fenomena *lockdown* ala kampung yang dilakukan sejumlah kampung secara mandiri, bahkan tindakan warga sampai menutup akses jalan menjadi viral di media sosial. Upaya masyarakat melakukan *lockdown* jalan kampung mengindikasikan adanya kebingungan masyarakat akibat dari ketidakjelasan informasi mengenai pandemi Covid-19 (Sucahyo, 2020). Tingginya gap pengetahuan mengenai penanganan Covid-19 menimbulkan ketidakpastian terkait resiko penularan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat luas (Ling et al., 2020). Fenomena ini menandakan ada persoalan komunikasi resiko yang tidak tersampaikan.

Penelitian terdahulu tentang pemanfaatan sosial media untuk penanganan bencana covid-19 sudah banyak dilakukan. Studi penelitian yang dilakukan di Yordania menunjukkan pemanfaatan media sosial dapat memberikan efektivitas dalam menumbuhkan kesadaran kesehatan masyarakat selama terjadinya krisis kesehatan akibat pandemi (Habes et al., 2020). Sedangkan Pemerintah China memanfaatkan platform media sosial untuk memobilisasi warga negara dan organisasi nirlaba mendukung respons pemerintah dalam upaya pemulihan covid (Y. Li et al., 2020). Di Indonesia, studi penelitian dari Subekti et al. (2020) menunjukkan bahwa peran media social instagram mampu menciptakan bentuk pola baru dalam komunikasi dan partisipasi sosial antara organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah dimanfaatkan sebagai media informasi yang mudah dijangkau masyarakat (Subekti et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fahriyani et al. (2020) mengungkapkan tentang media sosial twitter yang telah dimanfaatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyebarkan informasi terkait kebencanaan mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana (Fahriyani et al., 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni dengan berfokus pada kajian media sosial Facebook dan Twitter dari lembaga pemerintah daerah untuk pengelolaan informasi bencana

non-alam yakni pandemi yang terjadi dengan sangat cepat. Bencana pandemi yang terjadi dengan cepat tentu membutuhkan ketersediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Potensi media sosial sebagai alat untuk distribusi informasi bencana harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk membantu penanganan Covid-19. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana adaptasi pemerintah daerah menggunakan media sosial untuk penanganan bencana non-alam pandemi.

Tinjauan Pustaka

Banyak akademisi dan ilmuwan yang saat ini tertarik dengan studi terkait bencana yang telah dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana bencana terjadi dan bagaimana pencegahannya. Selain dengan studi, menanggapi bencana menuntut sikap tanggap masyarakat, tidak terkecuali media sosial sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum. Mensikapi hal tersebut, pemerintah juga perlu adaptif terhadap pemanfaatan media sosial untuk mendukung ketersediaan informasi bencana.

Tata kelola adaptif diciptakan untuk mendorong bentuk kolaborasi dalam sistem sosio-ekologis yang dapat merespon dengan cepat perubahan lingkungan (Wang et al., 2018). Dua faktor utama sangat penting bagi pemerintah untuk beralih ke pemerintahan yang adaptif. Pertama, kejutan traumatis kemungkinan akan mendorong pengerjaan ulang pengaturan dan praktik tata kelola yang direncanakan dan dilaksanakan. Kedua, kepemimpinan politik yang berkomitmen sangat penting untuk mereformasi praktik tata kelola dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih tangguh (Walch, 2019). Tata kelola adaptif adalah fenomena yang terjadi sebagai hasil interaksi upaya kolaboratif yang digerakkan secara lokal dengan hierarki regulasi dan manajemen pemerintah dan dianggap mampu menjadi panduan perubahan sosial di masyarakat dalam menanggapi dampak perubahan lingkungan yang cepat (Cosens & Chaffin, 2016). Definisi lain dari *Adaptive Governance* adalah fleksibilitas dan kemampuan belajar dari berbagai tingkatan pemerintahan atau lembaga yang dapat digunakan untuk ketahanan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan masalah yang mendesak (Kim et al., 2020).

Adaptif dan terintegrasi dalam ketahanan bencana akan memberikan kemampuan untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian akibat bencana, melalui perencanaan proses kelembagaan lintas sectoral, melibatkan banyak *stakeholder* serta sosialisasi pembelajaran sosial (Djalante et al., 2013). Dalam krisis bencana yang menghasilkan ketidakpastian situasional, data dan informasi diperlukan untuk mendukung upaya 'menyeimbangkan' penerapan tindakan pencegahan dengan pengelolaan dan pembelajaran adaptif. Maka, adanya sains menjadi sangat penting untuk mendukung analisis dan manajemen di dalam situasi krisis bencana (Aven & Bouder, 2020). Peningkatan koordinasi dan komunikasi, penghapusan sikap ego-sektoral, dan dukungan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana semuanya dapat membantu efektivitas penanggulangan bencana (Ariyanto,

2018). Tata kelola adaptif muncul dari pengakuan bahwa masyarakat yang lebih besar adalah aktor sosial yang rasional, tetapi bahwa pengetahuan mereka tidak sempurna dan tidak merata, dan bahwa menerapkan berbagai penilaian pada institusi yang berbeda bergantung pada komunikasi atau transparansi. Tata kelola adaptif memungkinkan sifat sistemik yang reflektif pemerintahan, dengan fokus pada politik dan transisi teknologi (Hurlbert, 2018).

Konsep *adaptive governance* memiliki kemampuan untuk diterapkan dalam transformasi pemerintahan digital yang menumbuhkan kolaborasi guna menyesuaikan diri dengan situasi teknologi dan publik yang berubah dengan cepat (Wang et al., 2018). Oleh karena itu, sumber daya manusia di berbagai institusi publik harus meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen *e-resources*, kepemimpinan manajerial, literasi digital, dan penelitian, serta melakukan transformasi, dalam rangka mempersiapkan perubahan yang semakin cepat dalam menciptakan informasi yang terinformasi masyarakat (Nashihuddin & Suryono, 2018). Dalam menghadapi bencana pandemi, dukungan *smart governance* juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas konten publikasi informasi dengan tetap mengutamakan keakuratan data dan informasi, serta dukungan penuh pemangku kepentingan dalam terciptanya sistem informasi yang komprehensif, representatif, portal data terbuka yang ramah, dan aman (Maizunati, 2018).

Penggunaan media sosial telah berkembang hingga kini sebagai alat komunikasi institusional, sekaligus alat komunikasi pribadi, karena kemampuannya dalam menawarkan informasi dengan cepat. Media sosial sangat berguna dalam menyampaikan informasi kejadian terkini dalam situasi darurat, seperti saat terjadi bencana (Panagiotopoulos et al., 2016). Pemanfaatan media sosial telah menjadi salah satu cara potensial untuk komunikasi resiko bencana secara tepat, konsisten dan berkelanjutan (Abrams & Greenhawt, 2020). Media sosial dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi komunikasi kesehatan (Liu et al., 2020). Intervensi terhadap situasi krisis akibat pandemi dengan memanfaatkan media sosial dapat digunakan sebagai upaya tanggap bencana di masa depan (Cheng et al., 2020). Media sosial memiliki potensi apabila dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab, untuk mendorong ketersediaan saluran penyebaran yang cepat dan efektif informasi berkualitas tinggi dari sumber yang dapat diverifikasi dengan mengoptimalkan respons medis terhadap krisis pandemi (Chan et al., 2020).

Media sosial dapat digunakan dalam manajemen krisis oleh lembaga pemerintah dan pejabat kesehatan untuk mengkomunikasikan informasi darurat kepada publik dalam membangun validitas informasi bencana (Rao et al., 2020). Media sosial telah menjadi media utama bagi publik untuk memperoleh informasi, mengungkapkan pendapat serta perasaan mereka (Han et al., 2020). Selain sebagai sarana untuk berbagi informasi, media sosial juga berperan dalam menggerakkan warga negara dan organisasi nirlaba untuk mendukung respons pemerintah dan upaya pemulihan bencana (Y. Li et al., 2020).

Media sosial dapat merespon terhadap persepsi resiko dan intensitas komunikasi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis karena penyebaran epidemi yang cepat dan sulit diprediksi (Yu et

al., 2020). Dalam masa krisis ini, komunikasi risiko menjadi komunikasi yang sangat penting antara organisasi/pemerintah dan masyarakat dengan tanggung jawab tetap ada pada rakyat dan peran media sangat penting untuk menjamin keaslian peredaran informasi (Sahoo et al., 2020). Informasi situasional yang dibagikan di media sosial dapat membantu program tanggap darurat dan sistem informasi krisis berbasis media sosial menjadi lebih efektif (L. Li et al., 2020). Selama krisis pandemi, penggunaan media sosial dapat membantu keterlibatan pemerintah dalam mengurangi masalah informasi asimetris (Y. Li et al., 2020).

Masyarakat beralih ke media sosial untuk membaca dan berbagi informasi seperti statistik, peringatan, panduan, dan kisah inspiratif yang menjadi pengetahuan penting untuk menghadapi keadaan krisis pandemi akibat penyebaran pandemi Covid-19 (Alam et al., 2020). Selama pandemi, mayoritas platform media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi tentang Covid-19, yang mendapat banyak perhatian (Zhao & Xu, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan media sosial dapat menjadi media pembelajaran informatif untuk menilai respon publik dalam menghadapi situasi krisis global akibat bencana pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya (Ferara, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan secara primer melalui wawancara (lihat tabel 1) dengan penentuan informan penelitian *purposive sampling*, yakni informan sudah ditentukan sesuai dengan keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi/kondisi yang menjadi kajian dalam fokus penelitian (Harahap, 2020). Kemudian secara sekunder data penelitian dikumpulkan dengan *N-Capture* dari beberapa akun media organisasi perangkat daerah Provinsi DIY (lihat tabel 2), sebagai data *time series* dari Juli 2020 sampai Desember 2020 dengan alasan pada bulan tersebut kasus positif Covid-19 mulai mengalami peningkatan di DIY sehingga menjadi perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pemerintah DIY.

Data dari akun media sosial tersebut diolah menggunakan aplikasi NVivo12 Plus, yakni suatu aplikasi *software* yang dikembangkan untuk penelitian kualitatif yang mampu melakukan analisis data serta menampilkannya ke dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram (Bandur, 2019). Fitur *world frequencies analysis* digunakan untuk mengecek jumlah kata pada hasil sumber penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui konten ataupun isi dari pesan informasi yang disampaikan dari sumber penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan Utama		Jabatan
1. Benny Saptianto, S.Sos.	Diskominfo DIY	Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi
2. Ditya Nanaryo Aji, SH, M.Ec.Dev	Humas Pemerintah Provinsi DIY	Kepala Bidang Humas
3. Annas Syafaat	BPBD DIY	Supervisor Media Sosial BPBD DIY
4. Danang Samsurizal, S.T	Tim Gugus Covid-19 DIY	Koord. Pusdalops BPBD DIY

Sumber: Peneliti, 2021

Tabel 2. Data Time Series

Institusi	Akun Media Sosial	
	Facebook	Twitter
Diskominfo DIY	@Kominfo DIY	@kominfodiy
BPBD DIY	@Pusdalops BPBD DIY	@Pusdalops_diy
Humas Pemda DIY	@Humas Pemda DIY	@humas_jogja

Sumber: Peneliti, 2021

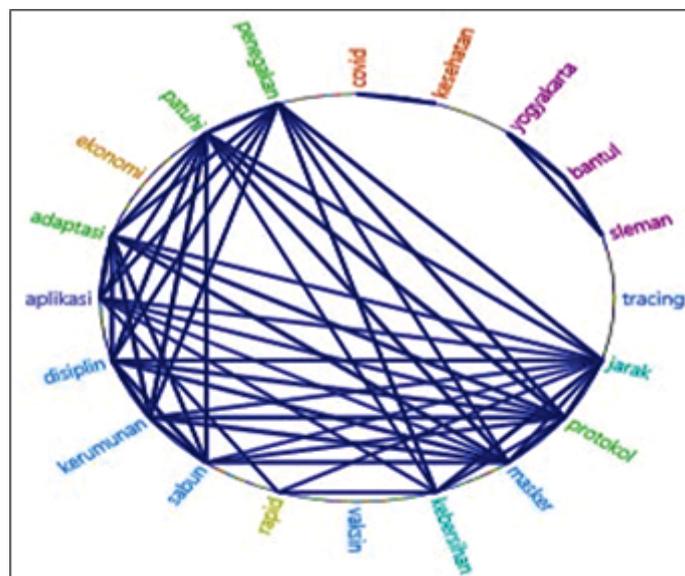
Hasil dan Pembahasan

A. Penggunaan Media Sosial dalam Penanganan Covid

Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi yakni Facebook. Pemanfaatan media sosial oleh organisasi pemerintah merupakan bentuk inovasi untuk semakin meningkatkan mobilitas informasi publik. Potensi penggunaan facebook tersebut mendorong Pemerintah DIY menjadikan platform ini sebagai sarana yang dapat membantu penyebaran informasi bencana Covid-19 untuk mendukung mobilisasi informasi dan komunikasi dalam penanganan Covid-19 di wilayah DIY. Studi penelitian dari Jayasekara (2020), menunjukkan facebook menjadi platform media sosial paling populer Sri Lanka untuk mengambil informasi terkait Covid-19 dibandingkan dengan twitter maupun Instagram. Facebook sebagai salah satu platform media sosial telah menjadi alat informasi bencana covid yang efektif. Selama pandemi masih terjadi, Facebook dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait sosialisasi protokol kesehatan, edukasi kepada masyarakat maupun informasi perkembangan kasus covid.

Pemerintah DIY menggunakan facebook, isu utama yang ingin dikomunikasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19. Hal ini dapat diketahui dari pola kata yang terbentuk hasil analisa menggunakan NVivo12 Plus terhadap konten informasi yang disampaikan Pemerintah DIY melalui media sosial facebook seperti berikut ini.

Gambar 1. Jejaring Kata Konten Informasi Covid-19 Pemerintah DIY pada Facebook Menggunakan NVivo12 Plus



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2021

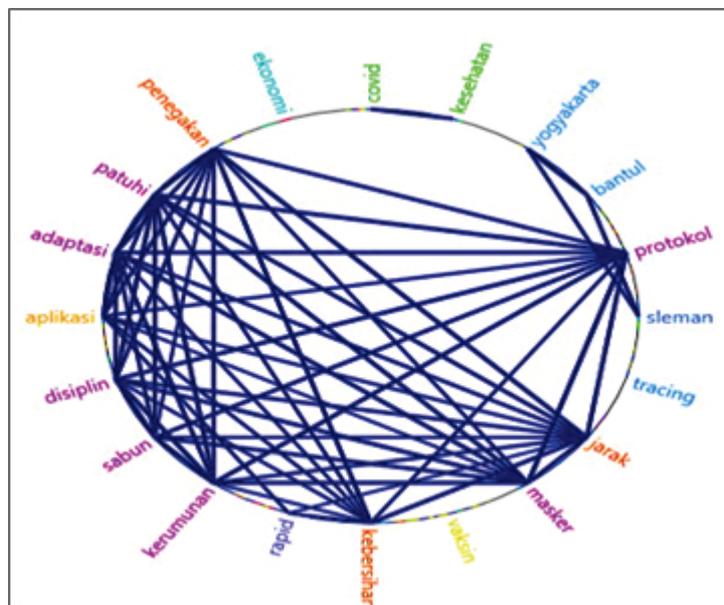
Dari gambar 1 dapat diketahui pola keterkaitan antara beberapa kata dalam pengelolaan informasi Covid-19 Pemerintah DIY dari media sosial facebook bulan Agustus-Desember 2020. Kata “jarak”, “protokol”, “masker” memiliki garis tebal yang terhubung dengan kata “adaptasi”, “disiplin”, “kerumunan”, dan “sabun” serta terhubung juga dengan kata “patuhi” dan “penegakan”. Keterkaitan kata-kata tersebut memiliki orientasi terhadap esensi dari prokes kesehatan Covid-19, yakni menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan. Isu mengenai penegakan prokes Covid-19 merupakan poin utama yang terus dikomunikasikan oleh Pemerintah DIY kepada masyarakat, agar mulai terbiasa beradaptasi dan mematuhi prokes tersebut sehingga kesadaran masyarakat untuk berdisiplin menerapkan prokes Covid-19 dapat menekan penyebaran Covid-19 di tingkat masyarakat. Respon media sosial membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pandemi, sehingga meningkatkan perlindungan diri dan kelompok masyarakat di lingkungan sekitarnya (La et al., 2020).

Media sosial selanjutnya yang digunakan untuk penanganan covid adalah Twitter. Dalam

perkembangannya, twitter telah menjadi salah satu platform media sosial yang dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi publik sehingga mempermudah dalam menemukan informasi maupun data yang diinginkan. Sebagai salah satu platform media sosial, twitter tidak hanya digunakan secara personal, tetapi banyak instansi pemerintah dan juga organisasi perusahaan mulai menggunakannya untuk kepentingan dalam mendukung kecepatan mobilitas informasi. Potensi twitter menjadikan Pemerintah DIY memanfaatkan platform ini sebagai sarana pengelolaan informasi bencana Covid-19 di DIY.

Pengelolaan informasi covid oleh Pemerintah DIY melalui platform media sosial twitter dari BPBD DIY, Humas Jogja, dan Kominfo DIY mayoritas isu yang dikomunikasikan kepada publik sebagai informasi bencana adalah mengenai protokol kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19. BNPB telah menggunakan media sosial twitter untuk menyebarkan informasi terkait bencana (Fahriyani et al., 2020).

Gambar 2. Jejaring Kata Konten Informasi Covid-19 Pemerintah DIY pada Twitter Menggunakan NVivo12 Plus



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2021

Seperti terlihat pada Gambar 2, pola hubungan antara beberapa kata informasi Covid-19 pemerintah DIY di media sosial twitter dari Agustus hingga Desember 2020. Kata “protokol”, “jarak”, “masker”, dan “keberhasilan” terhubung garis tebal dengan "penegakan", "kepatuhan", "adaptasi", "disiplin", "sabun", "kerumunan", dan "kesuksesan". Dilihat dari relevansi kata-kata ini, hal tersebut memiliki posisi penting dalam kaitannya dengan informasi pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19. Guna menanggulangi bencana wabah covid ini, protokol kesehatan menjadi isu krusial bagi

Pemerintah DIY yang secara aktif terus dikomunikasikan dengan twitter bagi masyarakat di wilayah DIY. Hal ini menunjukkan bentuk adaptasi pada pengelolaan informasi bencana pandemi melalui pemanfaatan media sosial untuk membantu pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah DIY, agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pemerintah dalam segala kegiatan utamanya memakai masker dan menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Twitter dapat menjadi alat penting bagi organisasi pemerintah menumbuhkan kesadaran publik dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam beradaptasi terhadap situasi pandemi sehingga dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di tingkat komunitas. Media sosial Twitter dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait bencana (Fahriyani et al., 2020).

Media sosial dapat dimanfaatkan menjadi media pembelajaran informatif untuk menghadapi situasi krisis akibat bencana pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya (Ferara, 2020). Habes et.al (2020) meneliti penggunaan media sosial untuk menyebarkan kesadaran Covid-19 dalam mengurangi krisis kesehatan saat ini. Dari beberapa konten informasi covid yang disampaikan melalui platform media sosial, secara eksplisit perlindungan kesehatan masyarakat menjadi hal prioritas dalam upaya penanganan bencana pandemi dari Pemerintah DIY. Berdasarkan pada ketiga platform media sosial (facebook dan twitter) yang digunakan oleh Pemerintah DIY untuk mendukung pengelolaan informasi bencana covid maka dapat diketahui perbandingan dari kata-kata yang sering digunakan atau dominan muncul adalah kata "Covid", "Kesehatan", "Protokol", "Masker" dan "Jarak". Ini menandakan intensitas penggunaan yang tinggi dari kata tersebut oleh Pemerintah DIY pada akun-akun media sosial dari ketiga platform media tersebut.

Kelima kata tersebut mewakili protokol kesehatan Covid-19, artinya secara garis besar bahwa Pemerintah DIY terus berusaha menyampaikan protokol kesehatan sebagai informasi yang bersifat himbuan kepada masyarakat melalui media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dari ancaman bencana covid. Ini menunjukkan bahwasannya media sosial dapat membantu memberikan kesadaran mengenai wabah pandemi untuk meningkatkan proteksi diri (La et al., 2020). Sehingga dapat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah DIY. Dalam mencegah penyebaran Covid-19 dibutuhkan rangkaian protokoler dan SOP pencegahan yang jelas (Ling et al., 2020). Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kesadaran akan covid (Habes et al., 2020).

B. Kapasitas Adaptif Pemerintah Provinsi DIY

Pengelolaan informasi bencana yang baik membutuhkan dukungan dari kapasitas lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Kapasitas lembaga yang adaptif dalam penanganan bencana salah satunya bisa diketahui dari kecepatan lembaga memahami informasi yang dibutuhkan publik. Karena dalam setiap penanganan bencana, komunikasi krisis bencana menjadi hal utama yang harus bisa dijalankan dengan baik. Di tengah masih terjadinya situasi pandemi covid, komunikasi krisis

bencana harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholder kebencanaan yang terlibat dalam penanganan pandemi covid. Informasi utama yang dibutuhkan masyarakat di dalam upaya untuk menangani covid ini pada saat awal terjadi pandemi adalah mengenai protokol kesehatan covid. Hal itu seperti pernyataan dari informant Ditya Nanaryo Aji sebagai berikut:

“Informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tentu dengan porsi yang berbeda. Kalau dulu di awal pandemi itu lebih banyak menginformasikan terkait protokol kesehatan karena memang belum banyak yang tahu mengenai covid ini”. (Informan 2, Kepala Bidang Humas Pemprov DIY)

Informasi protokol kesehatan ini disampaikan di awal karena memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang covid ini. Mengingat masih tingginya gap pengetahuan mengenai penanganan Covid-19, untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi tersebut maka dibutuhkan protokoler dan SOP pencegahan yang jelas (Ling et al., 2020). Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan semakin kesini masyarakat sudah mulai tahu covid, sudah semakin memahami terkait apa yang harus dilakukan jadi kebutuhan informasi yang diberikan juga berbeda. Di awal pandemi narasi informasi yang disampaikan banyak mengarah ke protokol kesehatan, sekarang terkait vaksinasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Annas Syafaat, dari BPBD DIY berikut ini:

“Kalau dulu di awal covid ini narasi informasi yang disampaikan terkait prokes, sekarang terkait vaksinasi. Kita sampaikan informasi terkait vaksin ini agar harapannya masyarakat itu percaya bahwa vaksin ini memang benar-benar aman sehingga masyarakat tidak takut dan banyak masyarakat yang mau untuk melakukan vaksinasi. Karena dengan vaksin ini menjadi harapan kita semua untuk mempercepat dalam memutus wabah atau virus covid ini”. (Informan 3, Supervisor Media Sosial BPBD DIY)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwasannya informasi mengenai vaksin ini harus disampaikan seakurat mungkin kebenarannya agar tidak menimbulkan disinformasi di masyarakat karena penyalahgunaan informasi yang menimbulkan hoaks terkait vaksin ini di media sosial. Kebenaran informasi vaksinasi tentu menjadi sebuah jaminan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mau divaksin, tidak takut lagi untuk vaksin, aman untuk divaksin, karena selain dengan protokol kesehatan harapan untuk memutus covid ini adalah banyak masyarakat yang bersedia untuk melakukan vaksinasi. Informasi mengenai vaksin harus disampaikan karena munculnya pesan-pesan informasi anti-vaksinasi pada platform media sosial menimbulkan konsekuensi yang menyebabkan keragu-raguan terhadap vaksin termasuk kepercayaan publik terhadap pengembangan vaksin di masa depan untuk pencegahan Covid-19 (Puri et al., 2020).

Selain itu terkait dengan protokol kesehatan dan vaksin, informasi utama lainnya yang dibutuhkan adalah mengenai data covid di DIY. Informasi mengenai data covid juga menjadi informasi utama yang dibutuhkan dalam upaya untuk penanganan Covid-19. Seperti diungkapkan dari hasil wawancara

dengan Satgas Penanganan Covid-19 DIY dan Diskominfo DIY berikut:

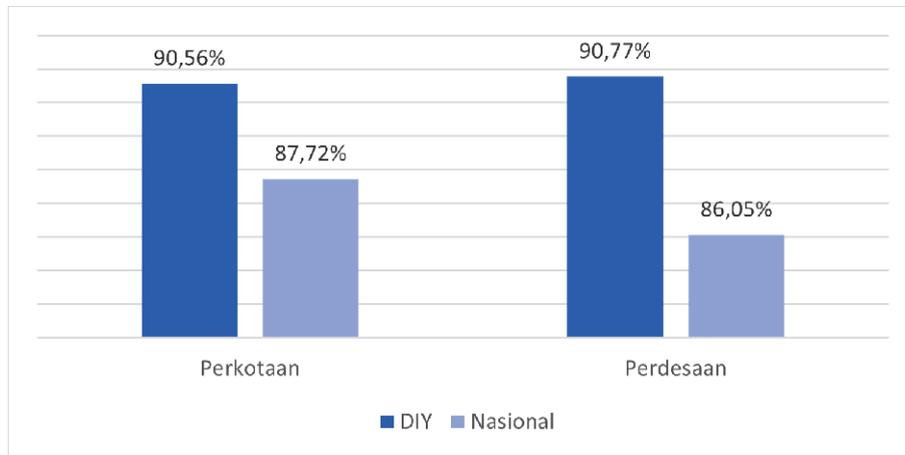
"Informasi utama yang dibutuhkan menurut kami adalah konfirmasi penambahan data harian covid. Karena agar masyarakat bisa mengetahui juga kondisi perkembangan covid yang terjadi di DIY itu seperti apa sehingga harapannya dengan data harian covid yang kita sampaikan bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap covid ini". (Informan 4, Koord. Pusdalops BPBD DIY)

'Selain itu kita juga selalu update data mengenai kasus covid di DIY ini, meskipun ada beberapa orang yang sudah bosan akan covid ini, tetapi ada yang masih mengikuti, ada yang masih menyimak juga terkait data informasi covid ini dan aware terhadap perkembangan kasus covid yang terjadi. Harapan kami masyarakat menjadi lebih sadar lagi, lebih berhati-hati lagi terhadap covid ketika memang sudah mengetahui zonasi dari perkembangan covid yang terjadi di wilayahnya'. (Informan 1, Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi Diskominfo DIY)

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya informasi mengenai jumlah konfirmasi penambahan data harian covid penting untuk diketahui publik agar masyarakat dapat mengetahui kondisi perkembangan covid yang terjadi di DIY. Hal tersebut akan mendorong masyarakat menjadi lebih berhati-hati, menyadari bahaya dari covid, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap covid ini. Karena dengan data terperinci, real-time, dan valid terkait perkembangan pandemi akan menghasilkan bukti kuat untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan (Xu et al., 2020). Pengkombinasian sumber data pemerintah dan informasi dari media sosial dapat meminimalkan potensi kekurangan data pada saat tanggap darurat bencana (Yulfa et al., 2019).

Untuk mempercepat akses informasi kepada masyarakat, Pemerintah DIY memanfaatkan media sosial. Masyarakat bisa mengunjungi platform media sosial dari OPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi covid seperti pada BPBD DIY, Humas Pemda DIY maupun Dinas Komunikasi dan Informatika DIY baik di IG, youtube, twitter, facebook lembaga tersebut. Dalam menginformasikan mengenai covid ini Pemerintah DIY selalu menyertakan tautan link sebagai sumber informasinya. Penggunaan media sosial yang efektif secara *real time* menjadi elemen penting dalam konteks komunikasi bencana dan krisis kesehatan untuk mengkomunikasikan informasi dan membangun kesadaran publik yang rentan selama bencana (Roy et al., 2020; Yu et al., 2020).

Gambar 3. Akses Masyarakat DIY terhadap Media Sosial Sampai Tahun 2020



Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2020

Berdasarkan pada gambar di atas, media sosial diakses oleh masyarakat DIY mencapai 90%, melebihi akses penggunaan media sosial nasional yang baru mencapai rata-rata 86%. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui media sosial baik di perkotaan maupun di pedesaan. Potensi ini menjadi peluang bagi Pemerintah DIY untuk memberikan informasi bencana covid kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan kebenaran informasi dengan cepat mengenai bahaya pandemi yang secara positif memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana (Chen et al., 2020; Malecki et al., 2020).

Penggunaan media sosial untuk semakin memudahkan akses informasi covid kepada masyarakat karena sistem informasi covid ini tidak bisa masuk pada sistem komunikasinya Dinas Kesehatan dengan rumah sakit yang hanya menampilkan informasi layanan rujukan saja. Seperti penjelasan dari Informan Annas Syafaat, berikut:

“Kami juga menginformasikan covid ini melalui media sosial. Karena sistem informasi covid ini tidak bisa masuk pada sistem komunikasinya Dinas Kesehatan dengan rumah sakit yang dia hanya menampilkan informasi layanan rujukan saja. Nah sistem komunikasi di Dinkes ini kan dulu memang tidak dirancang untuk penanganan pandemi. Jadi, ketika informasi covid ini dimasukkan ke sistem yang ada di Dinkes maka akan mengacaukan database yang sudah ada. Sehingga kemudian muncul aplikasi yang secara internal itu digunakan untuk melakukan komunikasi informasi covid di dinas dengan nama CMS (Corona Monitoring System) untuk menjangkau secara cepat update data covidnya”. (Informan 3, Supervisor Media Sosial BPBD DIY)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya karena memang sistem komunikasi yang ada pada Dinas Kesehatan memang tidak dirancang untuk penanganan pandemi. Selain memanfaatkan media sosial untuk memperlancar komunikasi secara eksternal kepada masyarakat, ditambahkan secara internal muncul aplikasi baru yang digunakan untuk melakukan komunikasi informasi covid di

dinas dengan nama CMS (Corona Monitoring System). Aplikasi tersebut digunakan untuk menjangkau secara cepat terbarukan mengenai data covid yang ada di DIY sehingga perkembangan covid ini dapat dipantau dan diketahuui perkembangannya secara cepat. Perkembangan situasi dan kondisi akibat covid harus bisa dipantau oleh otoritas pemerintah sebagai tindakan yang preventif dalam kerangka membangun respon terhadap virus baru ini dan wabah terkaitnya (Lai et al., 2020).

Kemudian, untuk jaminan validitas informasi bencana perlu dilakukan agar tidak menimbulkan informasi bencana yang salah di masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah DIY berupaya menjaga akuntabilitas dalam prosedur pengelolaan informasi covid Pemerintah DIY yakni dengan menyampaikan seluruh informasi covid kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informant Ditya Nanaryo Aji, SH, M.Ec.Dev seperti berikut:

Seluruh informasi mengenai covid ini kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kabupaten/Kota agar bisa disosialisasikan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke level terbawah, dan tetap dikoordinasikan dengan Dinas kesehatan setempat agar tidak menimbulkan salah informasi di masyarakat (Informan 2, Kepala Bidang Humas Pemprov DIY).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan prosedur kebijakan pengelolaan informasi bencana covid oleh Pemerintah DIY dengan menyampaikan seluruh informasi mengenai covid ini didistribusikan ke Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota agar bisa diteruskan untuk disosialisasikan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke level terbawah. Untuk menjamin validitas pengelolaan informasi covid ini, Pemerintah DIY selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar tidak menimbulkan salah informasi di masyarakat. Diperlukan penguatan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan bencana (Farizi et al., 2016).

Pada prinsipnya untuk menjamin validitas informasi dalam prosedur pengelolaan informasi covid, sebelum disampaikan ke publik maka informasi covid ini dilakukan *screening* terlebih dahulu. Tujuannya untuk mendapatkan koreksi bersama tim maupun *stakeholder* terkait secara internal pada OPD di Pemerintahan Provinsi DIY, sehingga informasi mengenai covid menjadi lebih valid lagi kebenaran informasinya. Agar dapat dimanfaatkan menjadi strategi komunikasi yang efektif maka informasi kebencanaan harus dikelola dengan hati-hati (Sahoo et al., 2020). Kemudian informasi tersebut apabila dianggap layak untuk dipublikasikan barulah disampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal informasi baik melalui media sosial maupun media online lainnya. Dalam masa pandemi, media sosial telah menjadi sarana untuk penyebaran mayoritas informasi covid secara luas (Zhao & Xu, 2020). Media sosial telah dijadikan oleh masyarakat sebagai sumber informasi tentang Covid-19 (Findayani, 2020).

Untuk mendukung kelancaran komunikasi krisis dalam penanganan bencana Covid-19 maka

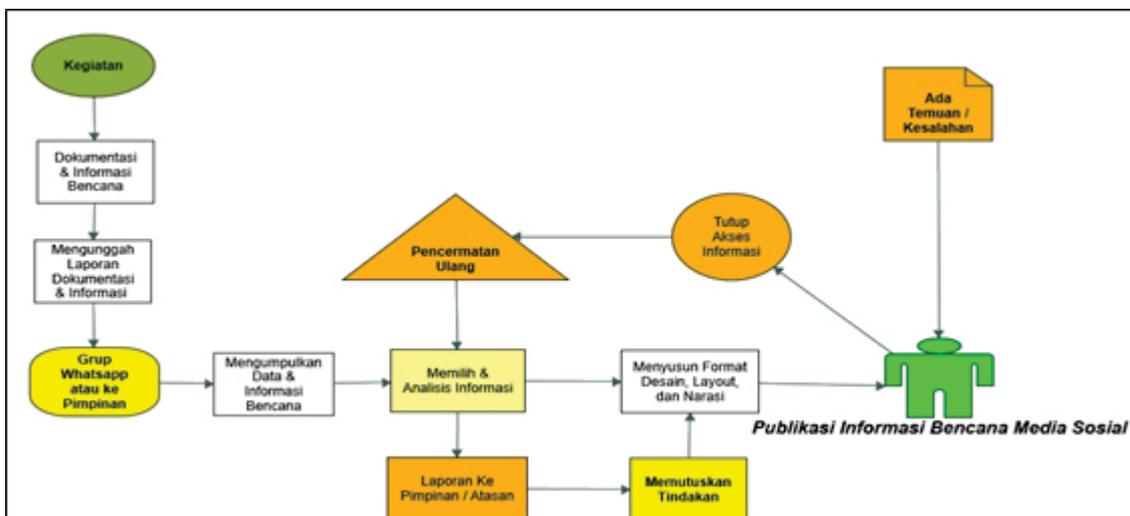
dibutuhkan komitmen dari pimpinan lembaga pemerintah. Pemerintah Provinsi DIY sangat sadar dan terbuka sekali untuk akses informasi ini utamanya melalui media sosial, karena keunggulan media sosial yang mudah, murah, cepet dan massif. Pemanfaatan media sosial sebagai media informasi kebencanaan memiliki efektifitas untuk menjangkau masyarakat secara luas (Jayasekara, 2020; Subekti et al., 2020).

Menurut Informant Ditya Nanaryo Aji,

Pemerintah Provinsi DIY juga sangat mendukung sekali untuk memberikan akses informasi mengenai covid ini yang seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada OPD maupun pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi dalam kaitannya untuk penanganan bencana covid. Humas Pemerintah Provinsi DIY selalu berupaya maskimal mendukung pemerintah daerah memberikan kemudahan akses informasi dan publikasi serta memberikan ketersediaan informasi yang benar, valid, dan akuntabel kepada masyarakat.

Komitmen juga ditunjukkan oleh pimpinan dari Lembaga BPBD DIY dalam mendukung kelancaran komunikasi bencana covid ini dengan telah disusunnya SOP informasi bencana berbasis media sosial, seperti pada gambar berikut.

**Gambar 4. SOP Publikasi Informasi Bencana Berbasis Media Sosial
Pemerintah Provinsi DIY**



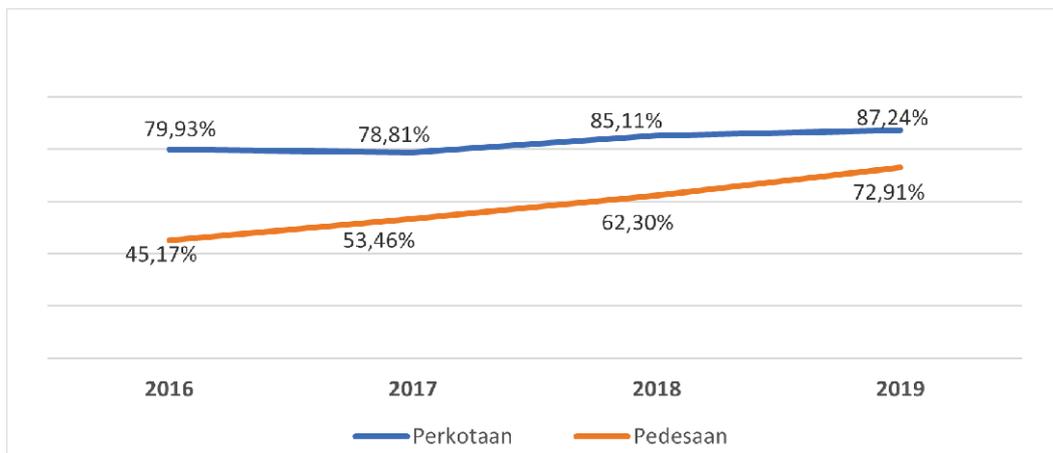
Sumber: Peneliti, 2021

Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Perkembangan *ICT Governance* menjadikan posisi media sosial memiliki nilai strategis untuk mendukung kelancaran pemerintah melakukan komunikasi informasi kebencanaan, seperti dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut mendorong Pemerintah DIY untuk melakukan adaptasi penggunaan media sosial dalam penanganan bencana, maka perlu disusun SOP agar

menghasilkan informasi bencana yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Media sosial dapat merespon persepsi dan intensitas komunikasi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis akibat penyebaran epidemi yang cepat dan sulit diprediksi (Yu et al., 2020).

Dukungan lainnya yang dapat mendorong adaptasi lembaga dalam pengelolaan informasi bencana menggunakan media sosial adalah adanya modal sosial dari masyarakat terkait intensitas dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Media sosial yang berbasis pada penggunaan internet, tentu harus didukung pemerataan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai agar dapat meningkatkan kemudahannya masyarakat dalam menggunakan internet. Meningkatnya akses teknologi dapat mendorong percepatan penggunaan media sosial (Puri et al., 2020). Akses penggunaan internet dari masyarakat DIY dapat dilihat seperti pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 5. Trend Perkembangan Akses Rumah Tangga Masyarakat Terhadap Internet di Provinsi DIY

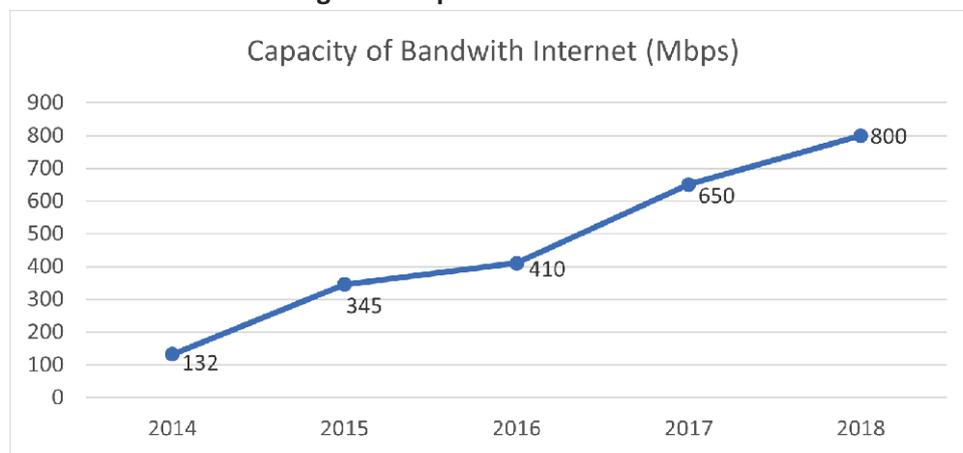


Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2020

Berdasarkan pada gambar tersebut dapat diketahui akses terhadap internet dari masyarakat DIY mengalami trend peningkatan. Untuk akses rumah tangga masyarakat DIY di wilayah pedesaan mengalami kenaikan cukup signifikan dari 45,17% di tahun 2017 menjadi 72,91% pada 2019, sedangkan untuk akses pada internet dari masyarakat perkotaan pada periode yang sama juga mengalami kenaikan 79,93% menjadi 87,24%. Peningkatan akses terhadap internet masyarakat DIY yang mengalami kenaikan baik di wilayah pedesaan sebesar 38,05% dan masyarakat perkotaan sebesar 8,38% dapat menjadi modal bagi lembaga pemerintah DIY untuk mendorong melakukan adaptasi pengelolaan informasi bencana menggunakan media sosial. Untuk mengatasi resiko kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran covid secara cepat maka dalam penanganan bencana dapat memanfaatkan teknologi (Menoni & Schwarze, 2020). Eya'ane (2020) berpendapat, teknologi informasi memiliki peran dalam memantau dan mengontrol penyebaran covid.

Kapasitas adaptasi lembaga terhadap pengelolaan informasi kebencanaan Pemerintah DIY didukung dengan kualitas jaringan internet yang kapasitasnya terus ditingkatkan. Dengan kapasitas internet yang besar menjadikan potensi pengelolaan informasi dan bencana dapat ditransformasikan media informasi digital sehingga penyebaran informasi bencana kepada masyarakat maupun *stakeholder* kebencanaan lainnya akan lebih cepat dilakukan oleh pemerintah. Adapun kapasitas internet dari Pemerintah DIY seperti pada gambar berikut:

Gambar 6. Peningkatan Kapasitas Internet Pemerintah Provinsi DIY

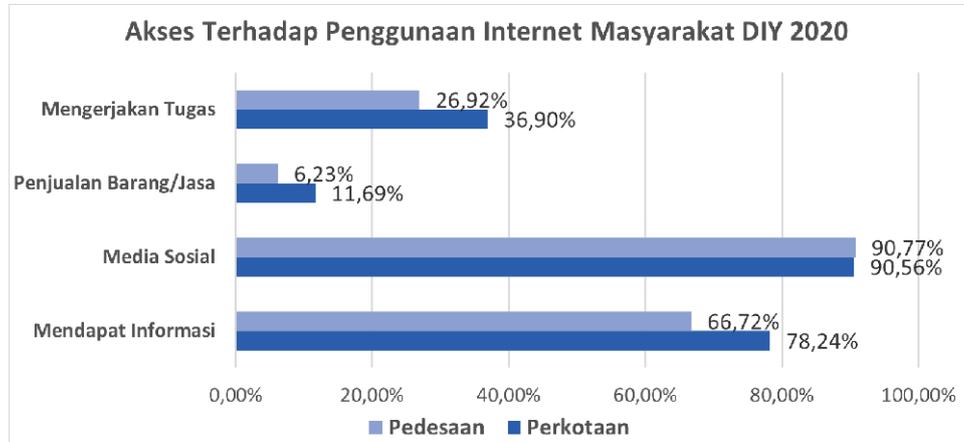


Sumber: Diskominfo DIY, 2020

Berdasarkan pada gambar di atas, diketahui kemampuan internet yang dimiliki Pemerintah DIY kapasitasnya semakin besar. Peningkatan kapasitas internet tersebut dari 132 Mbps menjadi 800Mbps (meningkat 83,5%) menjadi modal pemerintah untuk mendukung pemerintah melakukan pengelolaan informasi kebencanaan menggunakan media yang berbasis daring (dalam hal ini adalah media sosial). Sarana untuk mengubah informasi yang didukung oleh teknologi dapat digunakan dalam melakukan identifikasi terhadap kebutuhan bencana yang berbasis kewilayahan (Vordos et al., 2020). Menghadapi penyebaran covid yang terjadi secara cepat, pemanfaatan teknologi komunikasi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi dampak resiko kesehatan (Menoni & Schwarze, 2020).

Sedangkan, kondisi masyarakat DIY terhadap penggunaan internet mayoritas adalah untuk mengakses media sosial dan mendapatkan informasi. Pembangunan ketangguhan bencana menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan menghadapi bencana yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi media (Yuliana, 2019). Adapun untuk tingkat penggunaan media sosial dari masyarakat DIY seperti pada gambar berikut.

Gambar 7. Penggunaan Internet oleh Masyarakat di Provinsi DIY



Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2020

Berdasarkan pada gambar di atas, media sosial banyak diakses oleh masyarakat DIY yang berada di wilayah pedesaan mencapai 90,77% dan masyarakat perkotaan sebesar 90,56% yang artinya penggunaan media sosial bagi masyarakat DIY sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 90,66%. Penggunaan media sosial yang tinggi karena setiap orang pasti memiliki media sosial. Menurut ungkapan dari Bapak Benny Saptianto dari Diskominfo DIY (2021) hampir setiap orang memiliki media sosial. Informasi dari media sosial ini bisa disampaikan kepada semua orang dan akses informasi utama melalui media sosial dikarenakan adanya keunggulan media sosial yang mudah, murah, cepet dan masif. Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Ditya Nanaryo Aji dari Humas Pemda DIY (2021) terungkap, sekarang ini banyak masyarakat yang mencari informasi menggunakan di media sosial. Sedangkan menurut Bapak Annas Syafaat, dari BPBD DIY (2021), kondisi saat ini hampir semua masyarakat untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar mereka banyak yang menggunakan media sosial dan sangat sedikit sekali masyarakat untuk telepon, sehingga yang ada langsung melakukan cek informasi di media sosial. Melihat banyaknya masyarakat DIY baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang mengakses media sosial [lihat gambar 7] tentu menjadi pendorong bagi lembaga pemerintah melakukan adaptasi pengelolaan informasi bencana berbasis pada media sosial. Media sosial digunakan secara masif karena dapat menjadikan interaksi dan komunikasi lebih cepat tanpa memerlukan persiapan prasaranan fisik yang berlebih (Perangin-angin & Zainal, 2018).

Untuk mendukung akses yang cepat terhadap informasi covid ini, semua pihak harus mampu untuk melakukan adaptasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Bencana covid tentu menjadikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk pemerintah untuk memahami bahwa penggunaan teknologi itu sekarang menjadi kunci di era pademi ini. Sehingga, pengelolaan informasi bencana untuk penanganan pandemi dilakukan dengan adaptasi terhadap penggunaan teknologi informasi

untuk mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar stakeholder kebencanaan. Tata kelola adaptif memiliki potensi ditransformasikan dalam konteks pemerintahan digital untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon cepatnya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan tuntutan publik (Wang et al., 2018).

Kesimpulan

Penggunaan media sosial oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk menyampaikan pesan kesehatan sebagai informasi yang bersifat himbauan kepada masyarakat agar tercapai kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dari ancaman bencana covid. Kapasitas adaptif pemerintah daerah terhadap penggunaan media sosial didukung dengan kecepatan memahami informasi yang dibutuhkan publik yakni meliputi protokol kesehatan, vaksinasi dan mengenai data covid secara real-time untuk menghasilkan diseminasi informasi bencana pandemi secara tepat waktu. Diperkuat dengan adanya SOP informasi bencana berbasis media sosial sebagai kerangka dalam mewujudkan visi-misi penanggulangan bencana DIY yang beorientasi terhadap perkembangan teknologi dan menyesuaikan perubahan zaman. Didukung oleh modal sosial dari lembaga Pemerintah DIY yang memiliki kapasitas *bandwith* internet yang besar, meningkatnya masyarakat dengan kemampuan akses terhadap teknologi internet baik di wilayah pedesaan sebesar 38,05% dan masyarakat perkotaan sebesar 8,38%, serta akses terhadap penggunaan media sosial yang mencapai 90% dari masyarakat. Penelitian ini menjadikan tata kelola adaptif dalam komunikasi informasi bencana pandemi menggunakan media sosial menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi pemerintah daerah untuk bisa diadopsikan serta dikembangkan pada proses manajemen komunikasi dan informasi kebencanaan.

Daftar Pustaka

- Abrams, E. M., & Greenhawt, M. (2020). Risk Communication During Covid-19. *Journal Of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 8(6), 1791–1794. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.04.012>
- Alam, F., Dalvi, F., Shaar, S., Durrani, N., Mubarak, H., Nikolov, A., Nakov, P. (2020). *Fighting The Covid-19 Infodemic In Social Media: A Holistic Perspective and A Call To Arms*. Retrieved From <https://arxiv.org/abs/2007.07996>
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal Of Management Review*, 2(1), 161–172.
- Aven, T., & Boudier, F. (2020). The Covid-19 Pandemic: How Can Risk Science Help? *Journal Of Risk Research*, 23(7-8), 849-854. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1756383>
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif, Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus* (Edisi Pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Chan, A. K. M., Nickson, C. P., Rudolph, J. W., Lee, A., & Joynt, G. M. (2020). Social Media for Rapid Knowledge Dissemination: Early Experience from The Covid-19 Pandemic. *Anaesthesia*, 75(12), 1579-1582. <https://doi.org/10.1111/Anaes.15057>
- Chen, Q., Min, C., Zhang, W., Wang, G., Ma, X., & Evans, R. (2020). Unpacking The Black Box: How to Promote Citizen Engagement Through Government Social Media During The Covid-19 Crisis. *Computers In Human Behavior*, 110(March), 106380. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106380>
- Cheng, P., Xia, G., Pang, P., Wu, B., Jiang, W., Li, Y. T., & Bi, X. (2020). Covid-19 Epidemic Peer Support and Crisis Intervention Via Social Media. *Community Mental Health Journal*, 56(5), 786–792. <https://doi.org/10.1007/s10597-020-00624-5>
- Cosens, B., & Chaffin, B. C. (2016). Adaptive Governance Of Water Resources Shared With Indigenous Peoples: The Role of Law. *Water (Switzerland)*, 8(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/w8030097>
- Djalante, R., Holley, C., Thomalla, F., & Carnegie, M. (2013). Pathways for Adaptive and Integrated Disaster Resilience. *Nat Hazards*, 69, 2105–2135. <https://doi.org/10.1007/s11069-013-0797-5>
- Fahriyani, S., Harmaningsih, D., & Yunarti, S. (2020). Penggunaan Media Sosial Twitter Untuk Mitigasi Bencana Di Indonesia. *Jurnal Ikra-Ith Humaniora*, 4(2), 56–65.
- Farizi, I., Ismail, N., & Aulia, T. B. (2016). Analisis Kesiapsiagaan Uptd Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2kk) Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (Jika)*, 3(2), 85–93.
- Ferara, E. (2020). What Types of Covid-19 Conspiracies Are Populated By Twitter Bots? *Arxiv*, 1–25. Retrieved From <http://arxiv.org/abs/2004.10225>
- Findayani, A. (2020). Sosial Media Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Covid 19 (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Geografi*, 17(2), 63–69. <https://doi.org/10.15294/jg.v17i2.24506>
- Francois Eya'ane, M. (2020). Perspective: Covid-19 Outbreak and Information Tools. *Global Journal Of Infectious Diseases And Clinical Research*, 6(1), 009–012. <https://doi.org/10.17352/2455-5363.000028>
- Habes, M., Alghizzawi, M., Ali, S., Salihalnaser, A., & Salloum, S. A. (2020). The Relation Among Marketing Ads, Via Digital Media and Mitigate (Covid-19) Pandemic In Jordan. *International Journal Of Advanced Science And Technology*, 29(7), 12326–12348.
- Han, X., Wang, J., Zhang, M., & Wang, X. (2020). Using Social Media to Mine and Analyze Public Opinion Related to Covid-19 In China. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 17(8), 1–22. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082788>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pertama). Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hurlbert, M. A. (2018). Adaptive Governance (Management, Co-Management and Anticipatory). In *Adaptive Governance of Disaster, Water Governance - Concepts, Methods, And Practice* (Pp. 21–48). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57801-9>
- Islami, F., Fahrimal, Y., Husna, A., & Maulina, P. (2022). Keterdedahan Informasi Bencana dan

- Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Rob di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 4(1), 23–39. <https://doi.org/10.22146/jmki.82761>
- Jayasekara, P. K. (2020). Usage Of Social Media in Finding Information Related to Covid-19. *Information Science Trends*, 1107–1109.
- Kim, M., Cho, W., Choi, H., Hur, J., & Kim, M. (2020). Assessing The South Korean Model of Emergency Management During the Covid-19 Pandemic. *Asian Studies Review*, 44(4), 567–578. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1779658>
- La, V. P., Pham, T. H., Ho, M. T., Nguyen, M. H., Nguyen, K. L. P., Vuong, T. T., & Vuong, Q. H. (2020). Policy Response, Social Media and Science Journalism for The Sustainability of The Public Health System Amid The Covid-19 Outbreak: The Vietnam Lessons. *Sustainability*, 12(7), 2931. <https://doi.org/10.3390/su12072931>
- Lai, C. C., Shih, T. P., Ko, W. C., Tang, H. J., & Hsueh, P. R. (2020). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) and Coronavirus Disease-2019 (Covid-19): The Epidemic and The Challenges. *International Journal Of Antimicrobial Agents*, 55(3), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924>
- Li, L., Zhang, Q., Wang, X., Zhang, J., Wang, T., Gao, T. L., & Wang, F. Y. (2020). Characterizing The Propagation of Situational Information in Social Media During Covid-19 Epidemic: A Case Study on Weibo. *Ieee Transactions On Computational Social Systems*, 7(2), 556–562. <https://doi.org/10.1109/tcss.2020.2980007>
- Li, Y., Chandra, Y., & Kapucu, N. (2020). Crisis Coordination And The Role of Social Media In Response To Covid-19 In Wuhan, China. *The American Review of Public Administration*, 50(6-7), 698–705. <https://doi.org/10.1177/0275074020942105>
- Ling, L., Joynt, G. M., Lipman, J., Constantin, J. M., & Joannes-Boyau, O. (2020). COVID-19: A Critical Care Perspective Informed By Lessons Learnt from Other Viral Epidemics. *Anaesthesia Critical Care And Pain Medicine*, 39(2), 163–326. <https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.02.002>
- Liu, Q., Zheng, Z., Zheng, J., Chen, Q., Liu, G., Chen, S., & Ming, W. K. (2020). Health Communication Through News Media During The Early Stage of The Covid-19 Outbreak in China: Digital Topic Modeling Approach. *Journal of Medical Internet Research*, 22(4). <https://doi.org/10.2196/19118>
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral Terbuka dalam Mendukung Smart Governance Di Kota Magelang. *Journal Of Public Administration And Local Governance*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082>
- Malecki, K., Keating, J. A., & Safdar, N. (2020). Crisis Communication and Public Perception of Covid-19 Risk In The Era of Social Media. *Journals Permissions*, 2008–2010. <https://doi.org/10.1093/gerona/gly169/5057054>
- Menoni, S., & Schwarze, R. (2020). Recovery During A Crisis : Facing The Challenges of Risk Assessment

- And Resilience Management of Covid - 19. *Environment Systems And Decisions*, 40(2), 189–198. <https://doi.org/10.1007/s10669-020-09775-y>
- Nashihuddin, W., & Suryono, F. (2018). Tinjauan Terhadap Kesiapan Pustakawan Dalam Menghadapi Disrupsi Profesi di Era Library 4.0: Sebuah Literatur Review. *Khazanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 6(2), 86. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a1>
- Panagiotopoulos, P., Barnett, J., Bigdeli, A. Z., & Sams, S. (2016). Social Media in Emergency Management: Twitter As a Tool for Communicating Risks to The Public. *Technological Forecasting And Social Change*, 111, 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.010>
- Perangin-Angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal Aspikom*, 3(4), 737–754. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>
- Puri, N., Coomes, E. A., Haghbayan, H., & Gunaratne, K. (2020). Social Media and Vaccine Hesitancy: New Updates for The Era of Covid-19 and Globalized Infectious Diseases. *Human Vaccines And Immunotherapeutics*, 16(11), 2586–2593. <https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1780846>
- Rao, H. R., Vemprala, N., Akello, P., & Valecha, R. (2020). Retweets of Officials' Alarming Vs Reassuring Messages During The Covid-19 Pandemic: Implications for Crisis Management. *International Journal Of Information Management*, (June), 102187. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102187>
- Roy, K. C., Hasan, S., Sadri, A. M., & Cebrian, M. (2020). Understanding The Efficiency Of Social Media-Based Crisis Communication During Hurricane Sandy. *International Journal of Information Management*, 52(December), 102060. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102060>
- Sahoo, S. S., Sahu, D. P., & Kankaria, A. (2020). Mis-Infodemic: The Achilles' Heel In Combating The Covid-19 Pandemic in an Indian Perspective. *Monaldi Archives For Chest Disease=Archivio Monaldi Per Le Malattie Del Torace*, 90(2), 1–3. <https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1405>
- Subekti, P., Hafiar, H., & Bakti, I. (2020). Penggunaan Instagram Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Mengoptimalkan Destination Branding Pangandaran. *Jurnal Profesi Humas*, 4(2), 174–192. Retrieved From <https://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas>
- Sucahyo, N. (2020). Sebulan Corona Di Yogyakarta, Dari Satu Kasus Menjadi 62. *Www.Voaindonesia.Com*. Retrieved From <https://www.voaindonesia.com/a/sebulan-corona-di-yogyakarta-dari-satu-kasus-menjadi-62/5372694.html>
- Vordos, N., Gkika, D. A., Maliaris, G., Tilkeridis, K. E., Antoniou, A., Bandekas, D. V., & Ch. Mitropoulos, A. (2020). How 3d Printing and Social Media Tackles The PPE Shortage During Covid–19 Pandemic. *Safety Science*, 130(June), 104870. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104870>
- Walch, C. (2019). Adaptive Governance in The Developing World: Disaster Risk Reduction in The State of Odisha, India. *Climate and Development*, 11(3), 238–252. <https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1442794>
- Wang, C., Medaglia, R., & Zheng, L. (2018). Towards A Typology of Adaptive Governance in The Digital Government Context: The Role of Decision-making and Accountability. *Government Information*

- Quarterly*, 35(2), 306–322. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.003>
- Xu, B., Gutierrez, B., Mearu, S., Sewalk, K., Goodwin, L., Loskill, A., & Kraemer, M. U. G. (2020). Epidemiological Data From The Covid-19 Outbreak, Real-Time Case Information. *Scientific Data*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0448-0>
- Yu, M., Li, Z., Yu, Z., He, J., & Zhou, J. (2020). Communication-Related Health Crisis on Social Media: A Case of Covid-19 Outbreak. *Current Issues In Tourism*, 24(19), 2699–2705. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1752632>
- Yulfa, A., Aditya, T., & Sutanta, H. (2019). Spatial Data Infrastructure Enrichment Using Crowdsourced Data for Emergency Response. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(2), 95–104. Retrieved From <https://dx.doi.org/10.24895/mig.2019.21-2.936>
- Yuliana, I. (2019). Adopsi Social Network Analysis (SNA) dalam Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Masyarakat. *Jurnal Informatika Dan Ilmu Komputer (Jiko)*, 2(2), 49–54. <https://dx.doi.org/10.33387/jiko>
- Zaenuri, M. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Jurnal Unisia*, 36(81), 157–168.
- Zhao, Y., & Xu, H. (2020). *Chinese Public Attention to Covid-19 Epidemic: Based On Social Media*. <https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20038026>

